

# PERENCANAAN PENDIDIKAN BERORIENTASI KEBUTUHAN MASYARAKAT (*Social Demand Approach*)

H. Khumaidi

## *Abstrak*

Perencanaan secara umum merupakan suatu proses yang bersifat alamiah yang berlaku di dalam masyarakat berkenaan dengan sesuatu yang hendak dijalankan, walaupun dalam bentuk masih sederhana, namun dalam pelaksanaan tetap harus dipikirkan dahulu berbagai hal yang berkenaan dengan subyeknya, yaitu: apa (siapa) sasaran, dimana, bagaimana, kapan, berapa dan siapa yang melakukannya? Begitu pula Perencanaan Pendidikan berorientasi Kebutuhan Masyarakat.

Perencanaan ibarat seorang arsitek membuat gambar bestek) sebuah bangunan: apakah gedung perkantoran, perumahan, jembatan dan sebagainya, masing-masing mempunyai perlakuan berbeda dan sekaligus memberikan indikasi perbedaan subtansi yang akan disiapkan.

Dilatarbelakangi bahwa kondisi obyektif pendidikan di Indonesia masih mengalami kesenjangan, makahadirnya Perencanaan Pendidikan berorientasi Kebutuhan Masyarakat merupakan momen politik perencanaan dan kebijakan pendidikan yang relevan bagi pemerintah untuk rakyatnya!

**Kata kunci :** Perencanaan, Politik dan Kebijakan, Pendidikan untuk Masyarakat!

## A. Pendahuluan.

Sebuah pendekatan yang ditempuh dalam menyusun perencanaan pendidikan sangat tergantung dengan *Politik perencanaan dan Kebijakan pemerintah* terhadap pendidikan yang akan dilaksanakan. Contoh kebijakan pemerintah tentang *wajib belajar* bagi anak umur 7 s/d 12 tahun sebagai tuntutan masyarakat, maka perencanaan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan program wajib belajar menjadi sasaran dalam perencanaan pendidikannya. Maka perlu diperhatikan pentingnya sebuah perencanaan dapat dilihat dari berbagai aspek:

1. Perencanaan sebagai alat, yaitu alat yang dapat membantu para pengelola pendidikan untuk lebih jelas dan berdayaguna didalam melaksanakan tugas.

2. Perencanaan dapat menolong pencapaian suatu target atau sasaran secara efektif efisien lebih (ekonomis), tepat waktu, dan sekaligus memberikan peluang untuk mudah dikontrol dan monitor pelaksanaannya.
3. Perencanaan harus dipakai secara harmonis dengan alat-alat yang lain, seperti pengawasan maupun evaluasi dalam pelaksanaan.
4. Faktor manusia, yaitu pengetahuan dan kemampuan bekerja sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang baik.
5. Ada dua kelemahan dalam perencanaan, yaitu:
  - a. Faktor manusia yang sering diabaikan, karena dalam perencanaan hanya lazim dibicarakan *apa, bagaimana dan bila*, namun lupa tidak membicarakan *siapa* orang yang terlibat didalamnya. Bahkan sama sekali tidak melibatkan orang yang seharusnya mesti diikutsertakan dalam sebuah program atau proyek.
  - b. Kelemahan disebabkan perencanaan yang terlalu berlebihan, yaitu semula perencanaan sebagai petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, namun bila perencanaan disusun secara padat, ketat dan kaku, tidak manusiawi, maka justru dapat menimbulkan kebingungan dan ketidak pastian.<sup>1</sup>

## **B. Pengertian Perencanaan Pendidikan.**

### **1. Perencanaan secara Umum.**

Masalahnya perencanaan pendidikan tidak hanya disusun berdasarkan teori semata-mata, melainkan disusun dan dirumuskan dari pengalaman yang dilakukan oleh berbagai Negara, dan setiap Negara berbeda dalam menyusun definisi menurut kecenderungan situasi dan kondisi Negara yang bersangkutan. Perencanaan dalam arti sederhana merupakan suatu proses mempersiapkan hal-hal yang hendak dikerjakan pada waktu yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.<sup>2</sup>

### **2. Perencanaan secara Teori.**

Secara teori Beeby C.E. memberikan definisi: *Educational planning is the exercising of foresight in determining the policy, priorities and costs of an educational system, having due regard for economic and political realities, for the system's potential for growth, and for the needs of the country and of the pupils served by the system.*<sup>3</sup> Artinya perencanaan pendidikan adalah suatu usaha melihat kemasa depan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas dan biaya pendidikan dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada dalam bidang ekonomi, sosial dan politik untuk pengembangan potensi sistem

---

<sup>1</sup> Jusuf Enoch, *Dasar-dasar Perencanaan Pendidikan*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1992). hh. 4 - 5.

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 1.

<sup>3</sup> Menurut Beeby. C.E. *Planning and the Educational Administrator*. (Paris: Unesco. 1967).

pendidikan nasional, untuk memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang dilayani oleh sistem pendidikan nasional tersebut.

### 3. **Perencanaan secara Praktek.**

Definisi secara praktek (fungsi) perencanaan pendidikan, adalah: Merupakan proses mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang ekonomi, sosial budaya secara menyeluruh dari suatu negara.<sup>4</sup>

### 4. **Perencanaan menurut BAPPENAS:**

Sekali lagi statemen *Alternatif kebijaksanaan mengatasimalahkan yang akan dilaksanakan*, merupakan fungsi perencanaan pendidikan. Tiga unsur pokok (penting) dalam perencanaan pendidikan bisa dipenuhi dalam definisi Bappenas, yaitu:

- a. Keadaan, yaitu data dan informasi sebagai gambaran atas situasi sekarang.
- b. Keadaan yang diharapkan, yaitu sasaran yang dituju dan dicapai, dan
- c. Strategi pencapaian sasaran, yaitu berupa langkah-langkah nyata, berupa usaha, taktik atau caranya jelas.

## **C. Jenis-jenis Perencanaan Pendidikan.**

### **1. Perencanaan menurut waktunya.**

Perencana berdasarkan waktunya, dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

#### **a. Perencanaan Jangka Panjang (25 tahun).**

Perencanaan jangka panjang biasanya mempunyai rentang waktu 10, 20 atau 25 tahun. Mengingat rentang waktunya panjang, maka perencanaan jangka panjang mempunyai ciri-ciri, sebagai berikut:

- 1) Memuat ketentuan-ketentuan (perencanaan) yang bersifat umum.
- 2) Bersifat perpektif, yaitu memberikan arah yang jelas bagi perencanaan lebih pendek.
- 3) Dalam perencanaan jangka panjang menetapkan sasaran dan menetapkan harapan-harapan yang akan dicapai dengan disertai langkah-langkah kebijaksanaan umum untuk mencapainya.<sup>5</sup>

Rencana Jangka panjang pada dasarnya merupakan komitmen politik sebagai pengejawantahan Pancasila dan UUD 1945 yang dijabarkan oleh (MPR) melalui (GBHN) dicapai secara periodik (5 tahun). Yang perlu diketahui adalah perencanaan jangka panjang yang ditempuh secara bertahap, mempunyai indikasi untuk bisa memperbaiki dan sekaligus bisa menginovasikan pendidikan disetiap masa, maka perlu upaya:

---

<sup>4</sup>Jusuf. *Op.cit.* h. 3.

<sup>5</sup>*Ibid.* hh. 38-39.

- 1) Kajian mengenai keterkaitan antar-sektor. Seperti keterkaitan dengan kependudukan, ekonomi, ketenaga-kerjaan, politik, sosial-budaya dsb.
- 2) Kajian pembangunan sektor pendidikan Era Tinggi-landas. Maksudnya untuk menelusuri suatu gagasan tentang konsepsional pendidikan dalam rangka masyarakat industrialisasi, berbeda dengan agro-kultural.
- 3) Kajian Strategis, yaitu untuk memperoleh gagasan alternatif kebijaksanaan masa depan, untuk menghadapi tantangan-tantangannya.
- 4) Kajian Pembabakan Pembangunan merupakan pembabakan pembangunan masing-masing subsektor dari Repelita ke Repelita.<sup>6</sup>

#### **b. Perencanaan Jangka Menengah (5 tahun).**

Kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan dalam bidang pendidikan yang diurus oleh (Balitbang Dikbud), yaitu suatu badan yang bertugas menganalisis kebijaksanaan untuk mempersiapkan alternatif kebijakan pendidikan jangka menengah.<sup>7</sup> Perencanaan jangka menengah dijabarkan menjadi jangka pendek (tahunan) lebih operasional. Ciri karakteristik perencanaannya, sebagai berikut:

- 1) Paling efisien dilihat dari segi pelaksanaannya.
- 2) Tujuan dan target dicantumkan secara jelas, sehingga memberikan dasar-dasar yang pasti bagi kegiatan yang direncanakan.
- 3) Pendekatan perencanaan jangka menengah dapat diperpanjang (1 tahun), sambil memperbaiki sasaran-sasaran berdasarkan pelaksanaannya. Maksudnya, prestasi yang dicapai pada pelaksanaan yang lalu dijadikan umpan balik untuk perbaikan berikutnya, ini dikenal dengan jenis perencanaan berkelanjutan (*Rolling Plan*).<sup>8</sup>

Di Indonesia tidak menggunakan perencanaan *Rolling Plan*, tetapi perencanaan jangka menengah lima tahun secara bertahap, yaitu rencana pembangunan 5 Tahun I - II - III - IV dan seterusnya; setiap satu periode 5 tahun, dilanjutkan dengan perencanaan (baru) periode 5 tahun berikutnya, sambil memperbaiki kelemahan periode sebelumnya.

---

<sup>6</sup> Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 75 - 76.

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 80.

<sup>8</sup> *Rolling Plan* juga dikenal dengan perencanaan menggelinding.

**c. Perencanaan Jangka Pendek (tahunan).**

Landasan perencanaan pendidikan tahunan adalah SK Mendikbud No.0209/U/1982, yang dikoordinir oleh Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal, yaitu didasari empat alasan penting:

- 1) Pidato Presiden RI dihadapan DPR.
- 2) Usulan dari seluruh proyek tahunan dari lingkungan Depdikbud.
- 3) Usulan pengajuan dana masing-masing proyek yang harus dilakukan pembahasannya dengan Bappenas dan Dep. Keuangan.
- 4) Persetujuan anggaran untuk proyek-proyek pembangunan (disebut PSP, 1986, Bab 4, pada halaman 16).<sup>9</sup>

Perencanaan jangka pendek mempunyai jangka waktu kurang dari 4 tahun, lazim (1 tahun) dikenal dengan perencanaan tahunan, yaitu:

- 1) Sering disebut dengan perencanaan operasional, di Negeri kita merupakan perencanaan siklus tahunan yang berlangsung pada bulan akhir Maret atau awal April.
- 2) Perencanaan tahunan dibedakan menjadi dua:
  - a) Pertama, perencanaan tahunan pembangunan yang dituangkan kedalam Daftar Isian Proyek (DIP), dan
  - b) Kedua, perencanaan tahunan kegiatan rutin yang dituangkan kedalam Daftar Isian Kegiatan (DIK). Keduanya saling melengkapi artinya anggaran pembangunan akan mendukung pelaksanaan kegiatan yang anggarannya dari biaya rutin bila (belum) mencukupi.<sup>10</sup>

Pembuatan perencanaan pendidikan kesemua itu, mempunyai fungsi atau kegunaan sebagai berikut:

- 1) Untuk menghasilkan pembangunan dan juga keseimbangan antara sistem pendidikan dengan sistem lainnya dalam masyarakat.
- 2) Korelasi usaha pendidikan dengan kebijaksanaan nasional bagi pembangunan sosial. Untuk menghasilkan pembangunan secara seimbang pada setiap aspek dalam sistem pendidikan dan ekonomi.
- 3) Suatu usaha untuk mengkoordinasikan perkembangan kuantitatif dengan peningkatan kualitatif dalam suatu struktur isi dan metode.

---

<sup>9</sup> Balitbang-Dikbud-IEES, *Educational Sector Review, Capter IV "Policy Analysis and Data System"*, (Jakarta: Balitbang Dikbud and University of Florida, 1986).

<sup>10</sup> Jusuf. *Op-cit.* h. 41.

- 4) Ketentuan yang menjamin bahwa investasi dalam pendidikan memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi individu.<sup>11</sup>

## 2. Perencanaan menurut Jangkauannya.

Perencanaan makro dan mikro, perencanaan dikatakan makro apabila bersifat menyeluruh, umum, dan (Nasional) meliputi Tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan atau Daerah (regional). Perencanaan mikro, yaitu perencanaan suatu institusi (sering disebut dengan perencanaan institusional), misalnya suatu Universitas atau Sekolah. Perencanaannya lebih terinci, sehingga menjadi lebih konkrit, sedang perencanaan makro masih bersifat umum.<sup>12</sup>

## 3. Perencanaan menurut Pembuatnya.

Ada dua macam perencanaan menurut kewenangan pembuatnya, yaitu:

- a. Perencanaan sentralisasi adalah suatu sistem perencanaan di mana seluruh perencanaan, baik tingkat pusat maupun daerah, disusun oleh pusat.
- b. Perencanaan desentralisasi adalah sebaliknya, yaitu perencanaan daerah dibuat oleh daerah sendiri. Sedang di Indonesia menganut perencanaan disusun bersama, yaitu daerah dengan pusat secara bersama-sama.<sup>13</sup>

## 4. Perencanaan menurut Jenis Obyeknya.

Menurut obyeknya dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan rutin berupa kegiatan atau suatu kumpulan pekerjaan yang bersifat terus menerus dalam rangka mencapai hasil akhir, mengikuti sistem sektor, subsektor, program kegiatan, jenis pengeluaran dan mata anggaran yang sudah ditentukan (baku) yang waktunya hanya terbatas dalam satu tahun anggaran.
- b. Perencanaan pembangunan terdiri jangka panjang, sedang, dan pendek. Perencanaan Pembangunan Lima Tahun (Repelita) merupakan bagian Pola Dasar Pembangunan Nasional, Pola Umum Jangka Panjang dan Pola Umum Pembangunan Lima Tahun (GBHN) yang telah ditetapkan (MPR), kemudian dituangkan dalam rencana tahunan (rutin).

Baik perencanaan pembangunan maupun rutin, keduanya tercermin dalam (APBN), perbedaan keduanya terletak pada hal-hal, sebagai berikut:

- 1) Kegiatan perencanaan rutin merupakan pekerjaan yang bersifat terus menerus (*recurrent*).
- 2) Kegiatan perencanaan rutin tidak dibatasi untuk waktu tertentu.

<sup>11</sup>Ibid. hh. 41-42.

<sup>12</sup>Ibid. h. 75.

<sup>13</sup>Ibid. hh. 75-76.

- 3) Sedang perencanaan pembangunan (proyek) dibatasi dalam jangka waktu tertentu, apakah satu tahun, dua tahun dan sebagainya.<sup>14</sup>

#### **5. Perencanaan menurut Jenjangnya.**

Suatu badan yang menangani perencanaan dari tingkat pusat (Nasional) sampai dengan tingkat terendah (Daerah), terdapat beberapa jenjang baik secara struktural maupun non-struktural. Masing-masing departemen mempunyai badan perencanaan, baik secara horizontal maupun vertikal, sedang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai jenjang sebagai berikut:

##### **a. Perencanaan Tingkat Pusat, dibagi menjadi dua, yaitu:**

- 1) Biro Perencanaan (Sekretariat Jendral Depdikbud). Struktur Organisasinya, sebagai berikut:
  - a) Bagian Pengumpulan dan Pengolahan Data.
  - b) Bagian Penyusunan Rencana dan Program Rutin.
  - c) Bagian Penyusunan Rencana dan Program Pembangunan.
  - d) Bagian Monitoring Pelaksanaan Rencana dan Program.
  - e) Bagian Penyesuaian Rencana dan Program.
  - f) Bagian Penyajian dan Pelayanan Data.
- 2) Bagian Perencanaan (Sekretariat Dirjen Unit-unit Utama), di bagi kedalam unit-unit, yaitu:
  - a) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - b) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
  - c) Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.
  - d) Direktorat Jenderal Kebudayaan.
  - e) Inspektorat Jenderal, dan
  - f) Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.

##### **b. Perencanaan Tingkat Propinsi, dengan rincian tugas, sebagai berikut:**

- 1) Menyusun program kerja tahunan Bagian.
- 2) Mengadakan surve, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data.
- 3) Mengurus Kamar Data.
- 4) Membukukan dan mengandakan data tahunan dan pelayanan data.
- 5) Menganalisa dan memutuskan informasi tentang keadaan pendidikan.

---

<sup>14</sup>Ibid. hh. 76-77.

- 6) Mengumpulkan rencana sektoral tahunan Sekretariat, Bagian Perencanaan, dan Bidang di Lingkungan Kantor Wilayah serta Kabupaten/Kota.
- 7) Menyusun rencana tahunan, di lingkungan Kantor Wilayah yang bersifat lintas sektoral dan menjabarkan ke dalam program serta menyusun Pra Daftar Usulan Kegiatan dan Pembeayaan (Pra DUK dan DUP).
- 8) Memonitor pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan.
- 9) Mengurus Perpustakaan Dinas dan mempersiapkan informasi.
- 10) Mempersiapkan naskah pidato pimpinan.
- 11) Mengkoordinasikan perencanaan pembinaan Sekolah Swasta .<sup>15</sup>

**c. Perencanaan Tingkat Kabupaten/Kota.**

Pengertian Daerah bukanlah Tingkat Propinsi saja, namun juga Tingkat Kabupaten/Kota. Penyusunan Perencanaan tidak hanya berdasarkan temuan sendiri, tetapi akan lebih besar mendapatkan laporan Kabupaten/Kota, yang penting bagaimana menciptakan iklim dalam sebuah sistem dan mekanisme kerja yang baik sejak dari Sekolah-sekolah unit-unit teknis pelaksana terkecil. Sistem dan mekanisme yang perlu dibangun untuk mengatur arus komunikasi dua arah harus berjalan dengan lancar! Unit Perencanaan Kabupaten/Kota yang disebut Sub-Bagian Penyusunan Rencana dan Program mempunyai tugas, sebagai berikut: mengumpulkan data, mengolah dan menyajikan data, menyusun rencana program, memonitor perkembangan pelaksanaannya, serta meragakan data.<sup>16</sup>

**D. Pendekatan Berorientasi Kebutuhan Masyarakat.**

Pendekatan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu pendekatan perencanaan pendidikan yang ada, yaitu ada tiga macam pendekatan:

1. Pendekatan permintaan atau kebutuhan masyarakat (*social demand approach*),
2. Pendekatan ketenagakerjaan (*man power approach*), dan
3. Pendekatan efisiensi investasi (*invesment efficiency approach*) yang sering disebut dengan pendekatan nilai imbalan (*rate of retun approach*).<sup>17</sup>

Ada pendekatan sistem yang mempunyai pengertian lebih luas dari pendekatan diatas, karena ketiga pendekatan hanyalah merupakan salah satu dari obyek pendekatan sistem, yaitu berkenaan dengan masalah alat analisis, merupakan alat untuk menganalisis (*tool of analysis*) suatu obyek analisis.<sup>18</sup>

Perbedaan masing-masing secara garis besarnya: pendekatan permintaan atau kebutuhan masyarakat merupakan hajat masyarakat terhadap

<sup>15</sup>Ibid. hh. 80 - 81.

<sup>16</sup>Ibid. hh. 81 - 83.

<sup>17</sup>Ibid. h. 85.

<sup>18</sup>Ibid, hh. 98 - 99.



diselenggarakannya jenis pendidikan (Wajib Belajar) dengan konskuensinya, sedangkan pendekatan ketenagakerjaan, pemerintahlah yang berhajat untuk memikirkan (menganalisis) tentang terpenuhinya kebutuhan akan tenaga kerja dalam berbagai sektor lapangan kerja menurut jenis-jenis pendidikan (*Cost Effectiveness Analysis*), yaitu pendidikan (beaya) untuk mengamankan obyek-obyek kerja, lalu pendekatan nilai imbalan lebih memikirkan (analisis) untung-rugi investasi pendidikan dengan finansial yang bakal diperoleh (*Cost and Benefit Analysis*), hal ini berarti bila tidak menguntungkan jenis pendidikan tertentu tidak perlu diselenggarakan.

Pendekatan *Social Demand Approach*, artinya walaupun kebijaksanaan perencanaan dilakukan pemerintah, namun pengambilan keputusan kebijaksanaan didasarkan atas pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah membuat keputusan menambah jumlah sekolah-sekolah dasar, sebagai bukti mensukseskan Program Wajib Belajar yang diprogramkan pemerintah, dan pemerintah bertugas untuk menyediakan seluruh sarana yang diperlukan termasuk pelaksanaan programnya.<sup>19</sup>

Hal ini akan sangat berbeda dengan seseorang ingin menyekolahkan anaknya sampai perguruan tinggi, kebutuhan seperti ini bukan lagi sebagai bentuk pendekatan kebutuhan masyarakat (*social demand approach*), melainkan sudah berupa kebutuhan yang bersifat perorangan.

Indonesia pada fase awal Pembangunan Lima Tahun (1967/1968) dan pada tahun 1974/1975 Pemerintah dengan Wakil-wakil Rakyat mulai fokus sadar akan bunyi Pasal 31 Bab. XIII tentang Pendidikan dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran. Pesan UUD 1945 tersebut dijabarkan lagi oleh (MPR) dengan merumuskan bahwa pembangunan pendidikan diletakkan pada peningkatan mutu dan perluasan pendidikan dasar dalam rangka mewujudkan dan memantapkan pelaksanaan wajib belajar, serta meningkatkan perluasan kesempatan belajar pada tingkat pendidikan menengah, dan gagasan perluasan pendidikan dasar tersebut berlangsung terus melalui Ketetapan MPR 1978 dan 1983 yang masing-masing dijabarkan lagi dalam program-program Repelita ke-III dan ke-IV.<sup>20</sup>

Berdasarkan (GBHN) yang ditetapkan oleh (MPR) dan yang dilandasi oleh UUD 1945, maka lahirlah Instruksi Persiden mengenai pembangunan (SD Inpres). Ini contoh aplikasi perencanaan pendidikan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Disamping SD Inpres, pemerintah menyalurkan anak-anak usia sekolah (wajib belajar) ke SD Biasa, SD Kecil, Madrasah

---

<sup>19</sup> Ary H. Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hh. 87-88.

<sup>20</sup> Catatan: Repelita I: 1969/70 - 1973/74, Repelita II: 1974/75 - 1978/79, Repelita III: 1979/80 - 1983/84, Repelita IV: 1984/85 - 1988/89.

Ibtida'iyah, SD Pamong, Program Kelajar Paket A, dan bagi anak-anak cacat bisa di SLB, SDLB maupun SD Terpadu.<sup>21</sup>

**Tabel: Perkembangan SD Inpres:**

Obyeknya	1970/71	1973/74	1983/84
1. Gedung SD	64.040	65.910	142.312
2. Murid SD	12.815.000	13.069.456	25.565.000
3. % Murid SD	65 %	67 %	95,1 %

Dari tabel diatas dapat dibaca bahawa:

- Dalam 10 tahun antara 1973/74 s/d 1983/84 terjadi lonjakan 76.4023 buah (SD Inpres) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Anak usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) 1970 hanya 65 % menjadi 67 % pada 1973 hal ini berarti hanya bertambah 0,7 %.
- Pada 1973/74 dimulainya SD Inpres 1983 menjadi 2,8 % atau dengan penambahan rata-rata 1.250.000 orang.<sup>22</sup>

Manajemen Sekolah Dasar terdapat dualisme kewenangan, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, namun dalam pelaksanaan dibebankan kepada Menteri Dalam Negeri berdasarkan (PP No. 65 Tahun 1951). PP No. 65 tersebut Bab II pasal 2 menjelaskan ada hal-hal kewenangan diserahkan Propinsi, yaitu urusan-urusan:

- Mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah rendah.
- Memberikan subsidi kepada sekolah-sekolah rendah partikelir.
- Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di sekolah-sekolah rendah, meliputi: penerimaan murid, keuangan, tata usaha, alat-alat perlengkapan, gedung-gedung dan lapangan sekolah, pegawai termasuk guru-guru, keuang sekolah, alat-alat pelajaran, pemberian ijazah, dan perpustakaan.
- Pendirian dan penyelenggaraan Kursus-kursus Pengetahuan Umum (KPU) Tingkat B dan C dan pemberian subsidi kepada kursus-kursus partikelir.
- Perpustakaan rakyat tingkat menengah.
- Pendirian dan penyelenggaraan Kursus-kursus Pengajaran untuk Kursus Pengantar Kewajiban Belajar (KPKPKB).
- Penghubung antara Pemerintah dan Gerakan Pemuda.
- Memimpin dan memajukan kesenian.<sup>23</sup>

Kewenangan Mendikbut, adalah berkaitan dengan masalah teknis, yaitu: Pengawasan atas isi dan jalannya pelajaran, pimpinan teknis, hak untuk menetapkan, mengubah/menambah rencana pelajaran, isi dan tujuan, hak

<sup>21</sup> Ary H. Gunawan. *Op-cit.* h.121.

<sup>22</sup> Jusuf. *Op-cit.* h. 87.

<sup>23</sup> Tilaar. *Manajemen Pendidikan Nasional.* (Bandung: Remaja Rosda karya, 2004). H. 23.

untuk menentukan kitab-kitab pelajaran, urusan sekolah-sekolah konkordansi (sekolah yang dinaungi), hak untuk menetapkan liburan.<sup>24</sup>

Untuk menjembatani berbagai kemungkinan terjadi tumpang-tindih kewenangan kedua lembaga, maka pemerintah mengeluarkan PP No.6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah, untuk mengatur Tata Kerja masing-masing, antara Pemerintah Daerah Propinsi dengan Depdikbut, sehingga diharap tidak akan terjadi kesimpangsiuran kewenangan.

Kembali kepada tema di atas, yaitu bahwa pendekatan ini sangat efektif, sehingga perencanaan pendidikan pada umumnya mampu memperkirakan kebutuhan pada masa datang dengan menggunakan analisis, sebagai berikut:

- a. Pertambahan penduduk usia sekolah (7 - 12 tahun).
- b. Prosentasi (%) jumlah penduduk yang sekolah.
- c. Arus perpindahan murid dari satu jenjang, kejenjang yang lebih tinggi (misalnya SD ke SMTP dan ke SMTA sampai Perguruan Tinggi).
- d. Pilihan masyarakat/individu tentang jenis pendidikan yang diinginkan.
- e. Sehingga mampu memprakirakan kebutuhan:
  - 1) Memproyeksikan jumlah penduduk yang sekolah.
  - 2) Menghitung kebutuhan: ruang kelas, guru, dan fasilitas lainnya.
  - 3) Mempersiapkan kegiatan, rancangan beaya dan sebagainya.

Prakiraan seluruh kebutuhan pada poin (e) ini dapat ditabolaskan, sebagai berikut:

**Bagan: Pendekatan *social demand approach*:**

Sabyeknya	Kebutuhan	Prencanaan
Jumlah penduduk 1.250.000 orang (Usia 7 - 12 tahun)	1. Ruang kelas 2. Guru 3. Fasilitas lain	1. Jenis kegiatan 2. Usulan beaya

Data diatas bila dianalisis menjadi berbicara, sebagai berikut:

- a. Jumlah usia sekolah dasar 1.250.000 orang, kebutuhan yang disiapkan:
  - 1) Ruang kelas sebanyak  $1.250.000 : 40 =$  kl. 31.000 ruang kelas.
  - 2) Jumlah guru sebanyak (sama ruang kelas) = 31.000 orang guru.
  - 3) Fasilitas lain, seperti meja kursi, papan tulis, buku-buku dan sebagainya.
- b. Perencanaan yang dibuat, meliputi:
  - a) Diawali cacah jiwa usia anak (7 - 12 tahun).
  - b) Membangun gedung-gedung (ruang kelas).
  - c) Mengangkat guru yang akan mengajar.
  - d) Mengusahakan fasilitas.

<sup>24</sup>Ibid . h. 23 - 24.

- c. Merencanakan Pembeayaan, meliputi:
- 1) Biaya cacah jiwa? Umpama perjiwa dianggar Rp. 100.000,- X 1.250.000 orang, maka jumlahnya = Rp. 125.000.000.000,-
  - 2) Harga gedung/per lokal dianggar Rp. 10.000.000,- X kl. 31.000 buah, maka beayanya = Rp. 310.000.000.000,-
  - 3) Gaji guru perbulan Rp.1.000.000,- X 31.000 orang = Rp 31.000.000.000,- X12 bulan = Rp. 372.000.000.000,-
  - 4) Biaya penyediaan fasilitas: meja-kursi, papan tulis, buku-buku, alat olah-raga dan lain sebagainya), diperhitungkan kl. Rp.1.000.000,- X 1.250.000 orang = Rp125.000.000.000,- (Jumlah Total = Rp. 932.000.000.000,- atau hampir mendekati satu trillion rupiah).<sup>25</sup>

Adapun kelemahan-kelemahan pendekatan kebutuhan masyarakat, sebagai berikut:

- a. Tidak begitu mengindahkan besarnya sumber-sumber dana yang tersedia. Sehingga besarnya alokasi dana untuk pembangunan sektor lain terabaikan.
- b. Kurang memperhitungkan perlunya keseimbangan sifat dan macam tenaga kerja yang diperlukan oleh sektor lain. Dampaknya banyak pengangguran.
- c. Penerimaan jumlah murid, bila tidak diimbangi jumlah tenaga pengajar dan fasilitas lain, akan menimbulkan penurunan mutu lulusan.
- d. Sekaligus mengabaikan pendekatan lain, seperti kebutuhan tenaga kerja.<sup>26</sup>

Kritik bersifat umum adalah mengapa pendidikan di Indonesia selama ini, sejak UU Pendidikan No.2 Tahun 1989 tidak mengalami kemajuan berarti? Alasan-alasan kritik tersebut cukup menarik, antara lain:

- a. Secara realitas obyektif bahwa selama tiga puluh tahun belakang ini menunjukkan kehidupan berbangsa dan bernegara kurang dapat berkembang. Yaitu etatisme dalam bidangpendidikan tidak memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai tuntutan dan kebutuhan hidup serta perkembangan teknologi.
- b. Masyarakat perlu diberi peluang untuk penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan (prinsip belajar sepanjang umur untuk keperluan tuntutan lapangan kerja).
- c. Kurikulum Nasional yang diberlakukan sampai dewasa ini (produk UU No.2 Tahun 1989) merupakan kurikulum sentralistis dan sarat

<sup>25</sup> Jumlah tersebut hanya perhitungan contoh saja.

<sup>26</sup> Jusuf. *Op.cit.* hh. 89 - 90.

dengan subyek akademik (ilmu) kurang menyentuh kebutuhan. Dan apabila dikonfirmasi dengan UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pengelolaan secara sentralisasi pendidikan akan mematikan prakarsa, partisipasi masyarakat, inovasi dan kreatifitas peserta didik.

- d. Kebijakan pengembangan pendidikan dasar dalam realita belum dapat dijadikan fondasi bagi prinsip belajar sepanjang hidup dan termasuk sebagai dasar kejenjang pendidikan selanjutnya. Masih berkesan nuansa pemerataan secara kuantitatif bukan kualitas hasil yang dituju dan sebagainya.<sup>27</sup>

#### **D. Kesimpulan dan Penutup.**

1. Perencanaan Pendidikan berorientasi Kebutuhan Masyarakat (*Social Demand Approach*), merupakan jenis perencanaan pendidikan yang berciri tradisional, muncul secara alamiah, sehingga pemerintah sebagai pemegang kebijakan bisa merencanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak pada situasi tempat dan waktu tertentu.
2. Kebijakan pemerintah tentang Wajib Belajar anak usia sekolah 7 - 12 tahun. Sehingga lahir (Inpres) Wajib Belajar, dan konsekuensinya.
3. Keunggulannya adalah sebagai amanat UUD 1945 pada pasal pendidikan dan kebudayaan bisa dipenuhi, namun kelemahannya karena menekankan prinsip pemerataan, maka aspek mutu menjadi terabaikan.

Demikian sebagai kata penutup mohon saran dan kritik pembaca bila ada kekurangan, dan semoga Allah swt selalu memberkahi kita semua.  
Amien dan  
Wassalam.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abin Syamsuddin Makmun, *Kumpulan Materi Seri Perencanaan Pendidikan*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Dikbud RI, 2000).
- Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).
- Anonim, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, Standar Nasional Pendidikan (SNP), Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005*, (Jakarta: Fokusmedia, 2005).
- Arthur Lewis, diterjemak Kartasapoetra, Komaruddin, *Perencanaan Pembangunan Dasar-dasarKebijaksanaan Ekonomi*, (Jakarta: Aksara Baru, 1986).

---

<sup>27</sup> Yusufhadi Miarso. *MenyemaiBenihTeknologi Pendidikan*, (Jakarta: Prenada Media, 2004). hh. 681-682.